



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 1995-2014**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam
Bidang Ekonomi Syariah Konsentrasi
Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh

SITI MUNINGGAR
NIM. 12 230 0204

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 1995-2014**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam
Bidang Ekonomi Syariah Konsentrasi
Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh

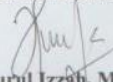
SITI MUNINGGAR
NIM. 12 230 0204

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I


Rosnani Siregar, M.Ag
Nip. 19740626 200312 2 001

PEMBIMBING II


Nurul Izzah, M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, 11 Agustus 2017
a.n. **Siti Muninggar** Kepada Yth:
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Siti Muninggar** yang berjudul, "**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ekonomi syariah konsentrasi ilmu ekonomi syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

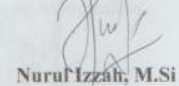
Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I


Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

PEMBIMBING II


Nurul Izzah, M.Si

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MUNINGGAR
NIM : 12 230 0204
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Juni 2017

Saya yang Menyatakan,


SITI MUNINGGAR
NIM : 12 230 0204

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Muninggar
NIM : 12 230 0204
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBAGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 1995-2014**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 20 Juni 2017

Saya menyatakan,



Siti Muninggar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : SITI MUNINGGAR
NIM : 12 230 0204
JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
SKRIPSI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 1995-
2014

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Anggota

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

2. Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

3. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

4. Budi Gautama Siregar, S.Pd.,MM
NIP.19790720 201101 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu/26 Juli 2017
Pukul : 09.00WIB s./d 11.30 WIB
Hasil/Nilai : 73,25 (B)
IPK : 3,35
Predikat : Amat Baik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera
Utara Tahun 1995-2014**

Nama : **Siti Muningggar**

NIM : **12 230 0204**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 12 Oktober 2017
Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama :SitiMuninggar
NIM :12 230 0204
Judul :**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014**

Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah tidak selalu diiringi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan peningkatan kemiskinan diiringi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rumusan penelitian ini adalah apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah terhadap IPM di Sumatera Utara tahun 1995-2014.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu ukuran dalam menilai seberapa baik pencapaian sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumberdaya ekonomi yang secara langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Sampel yang digunakan sebanyak 20 data pertahun.

Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dimana $t_{hitung} (0,1304) > \alpha(0,05)$, kemiskinan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dimana $t_{hitung} (0,3076) > \alpha (0,05)$, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan $t_{hitung} (0,0026) < \alpha (0,05)$. Variabel pertumbuhan ekonomi (X1), kemiskinan (X2), dan pengeluaran pemerintah (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel IPM (Y) terlihat dari $F_{hitung} (0.005144) < F_{tabel} (3.13)$. Koefisien determinan (R^2) sebesar 0,539971 artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah mampu menjelaskan variabel IPM sebesar 53,99 persen. Sedangkan sisanya sebesar 46,01 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dalam artian masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan IPM.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014”**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan contoh teladan kepada umat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di Yaumul mahsyar kelak.

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Ketika melakukan penelitian, tidak jarang peneliti menemui kesulitan dan hambatan. Namun, berkat arahan dan bimbingan para dosen dan berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini tidak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pembangunan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, SE., M.Si, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak

Drs. H. Syamsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si, selaku Wakil Dekan Akademik, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
3. Bapak Muhammad Isa, S.T, M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Izzah Lubis, SE., M.Si selaku pembimbing II. Terimakasih atas ilmu yang mulia dan waktu yang telah diberi untuk membimbing peneliti hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Kepada Ayahanda tercinta (Mariadi) dan Ibunda tersayang (Erni Suryani), terimakasih untuk dukungan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan yang tiada hentinya diberikan kepada peneliti. Tidak lupa pula petuah-petuah bijak disaat peneliti lemah serta menjadi teladan bagi peneliti untuk memahami arti kesabaran dan keikhlasan, semua demi keselamatan dan keberhasilan peneliti. Semoga pengorbanan Ayah dan Ibu dapat peneliti balas di masa mendatang.

6. Buat teman-teman seperjuangan ES1-IE NIM 12 dan rekan-rekan mahasiswa. Terutama untuk sahabat-sahabat saya Lusy Lestari, Anjelina Lubis, dan Nopri Khairuyanni, terimakasih atas dukungan dan saran kepada peneliti, baik berupa masukan, kritik, waktu, dan buku-buku referensinya. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan kita.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan rahmat dan kurnia dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2017

Penulis,

SITI MUNINGGAR
NIM. 12.230.0204

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Esdan ye
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Definisi Operasional Variabel.....	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Kegunaan Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori	13
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	13
a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia	13
b. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia.....	17
c. Prinsip Utama Dalam Ekonomi Pembangunan Islam.....	19
2. Pertumbuhan Ekonomi	23
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	23
b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	24
c. Pendapatan Per Kapita	26
d. Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi	28
e. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Modern	31
f. Teori Pertumbuhan Ekonomi	33
g. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam	36
3. Kemiskinan	37
a. Pengertian Kemiskinan.....	37
b. Pengeluaran Makanan	38
c. Pengeluaran Bukan Makanan	39
d. Jenis-Jenis Kemiskinan	40
e. Indikator Kemiskinan	41
f. Lingkaran Kemiskinan.....	44

g. Kemiskinan Menurut Pandangan Islam	46
4. Pengeluaran Pemerintah	47
a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah	47
b. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian	48
c. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	49
d. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah	50
e. Dasar Teori Pengeluaran Pemerintah	52
f. Pengeluaran Pemerintah Dalam Islam	55
B. Penelitian Terdahulu	56
C. Kerangka Pikir	61
D. Hipotesis	63

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	65
1. Lokasi dalam Waktu Penelitian	65
2. Jenis Penelitian	65
3. Populasi Dan Sampel	65
4. Teknik Pengumpulan Data	67
5. Teknik Analisis Data	67
a. Analisa Regresi Berganda	67
b. Uji Asumsi Klasik	68
1. Uji Normalitas	68
2. Uji Multikolinearitas	68
3. Uji Heteroskedastisitas	69
4. Uji Autokolerasi	69
5. Uji Hipotesis	70
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	70
b. Uji F	70
c. Uji t	71

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Variabel	72
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72
2. Pertumbuhan Ekonomi	73
3. Kemiskinan	74
4. Pengeluaran Pemerintah	78
B. Hasil Estimasi	78
1. Hasil Regresi Berganda	78
2. Uji Asumsi Klasik	80
a. Uji Normalitas	80
b. Uji Multikolinearitas	80
c. Uji Heteroskedastisitas	81
d. Uji Autokolerasi	82
3. Uji Hipotesis	83
a. Uji t	83
b. Uji F	84

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	85
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	86
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	87
2. Pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	88
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	90
D. Keterbatasan Penelitian	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara	2
Tabel 1.2. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 1995-2014 (Miliar Rupiah)	3
Tabel 1.3. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1995-2014.....	5
Tabel 1.4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tahun 1995-2014	7
Tabel 1.5. Definisi Operasional Variabel.....	9
Tabel 2.1. Indikator Kemiskinan.....	42
Tabel 2.2. PenelitianTerdahulu	57
Tabel 4.1. Hasil Estimasi	78
Tabel 4.2. Hasil Uji Multikolinieritas	81
Tabel 4.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas	82
Tabel 4.4. Hasil Uji Autokolerasi	82
Tabel 4.5. Uji t	83
Tabel 4.6. Uji F	85
Tabel 4.7. Uji Koefisien Determinan (R^2)	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Lingkaran Kemiskinan	45
Gambar 2.2. Kerangka Pikir.....	62
Gambar 4.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014.....	72
Gambar 4.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014 (Miliar Rupiah).....	74
Gambar 4.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014 (Jiwa).....	75
Gambar 4.4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara (Miliar Rupiah) Tahun 1995-2014.....	77
Gambar 4.5. Hasil Uji Normalitas.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang.

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, terlepas dari hal-hal yang lain, kedua hal itu merupakan hal yang penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan.

Keterkaitan antara kesehatan dan pendidikan mencakup perlakuan analitis yang serupa, karena keduanya merupakan bentuk dari modal manusia, dampak ganda dari pengeluaran untuk kesehatan terhadap efektivitas sistem pendidikan dan sebaliknya.¹ Modal manusia harus mendapat perhatian tersendiri, bahkan didalam perekonomian yang tumbuh dengan cepat. Distribusi kesehatan dan pendidikan boleh jadi sangat timpang seperti halnya pendapatan dan kekayaan. Namun peningkatan kesehatan dan pendidikan dapat membantu keluarga untuk keluar dari jebakan lingkaran setan kemiskinan. Pada saat yang sama, penyebab

¹Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*. Terjemahan oleh Haris Munandar, Puji A.L., Jilid 1. Edisi Kedelapan. (Jakarta: Erlangga, 2003). Hlm. 404-405.

paling penting dari kesehatan yang buruk di negara-negara berkembang adalah kemiskinan itu sendiri.

Salah satu indikator yang membedakan antara negara maju dengan negara berkembang adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mencakup tiga komponen dasar yang mengukur kualitas hidup manusia yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan, dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)
1995	70,23
1996	70,50
1997	70,51
1998	70,53
1999	66,60
2000	66,42
2001	80,50
2002	68,80
2003	70,50
2004	71,40
2005	72,03
2006	72,46
2007	72,78
2008	73,29
2009	73,80
2010	74,19
2011	74,65
2012	75,13
2013	75,55

2014	68,87
------	-------

Sumber : BPS Sumatera Utara

Tabel 1.1 diatas pada periode tahun 1995-2014 mengalami fluktuasi pada tahun 2006 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 0,59 persen, dan setiap tahunnya meningkat hingga ke tahun 2013. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tinggi terjadi pada tahun 2001 mencapai 21,19 persen dan kemudian menurun pada tahun 2014 sebesar 6,68 persen.

Keseimbangan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia merupakan salah satu hal yang saling berkaitan dan harus searah agar tercipta keberhasilan pembangunan. Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam rangka memicu pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembangunan manusia. Selain itu, capaian pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dengan diimbangi distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan dapat diinvestasikan untuk pembangunan manusia. Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

**Tabel 1.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 1995-2014 (Miliar Rupiah)**

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)
1995	64.753.80	-
1996	67.714.73	4,57
1997	68.065.40	0,51
1998	66.332.68	-2,54
1999	68.910.08	3,88
2000	71.116.21	0,35
2001	71.908.35	3,98
2002	75.189.50	4,56
2003	78.806.68	4,80
2004	83.328.94	5,73

2005	87.897.79	5,48
2006	93.347.40	6,19
2007	99.792.27	6,90
2008	106.172.36	6,39
2009	111.559.22	5,07
2010	118.640.90	6,34
2011	126.590.21	6,70
2012	134.460.10	6,22
2013	142.537.12	6,00
2014	149.991.81	5,05

Sumber : BPS Sumatera Utara

Tabel 1.2 diatas periode 1995-2014 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1998 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami penurunan sebesar 2,54 persen yang diakibatkan terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Selanjutnya PDRB terus meningkat hingga tahun 2014 telah mencapai Rp. 152.782.22 miliar.

Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan yang positif sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga ikut meningkat dan sebaliknya. Namun berdasarkan data yang dipaparkan diatas pada periode tahun 1995-2014 peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilihat pada tahun 1995, 1999, 2000, dan tahun 2014. Pada beberapa tahun tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Berdasarkan data yang dipaparkan sebelumnya, menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain pertumbuhan ekonomi, kemiskinan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi pemerintah yang mempengaruhi pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara. Perkembangan penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan sehingga diperlukan beberapa program guna meminimalisasi tingkat fluktuasinya dan dengan demikian pembangunan manusia dapat lebih stabil. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga kebutuhan yang lain seperti kesehatan dan pendidikan pun terabaikan. Adapun perkembangan penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 1995-2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1995	3.439.020	-
1996	1.234.194	-64,11
1997	1.836.203	48,77
1998	3.550.642	93,36
1999	1.972.700	-44,44
2000	1.199.900	-39,17
2001	1.541.895	28,50
2002	1.883.890	22,18
2003	1.889.400	0,29
2004	1.800.100	-4,72
2005	1.760.228	-2,21
2006	1.979.702	12,46
2007	1.768.500	-10,66
2008	1.613.800	-8,74
2009	1.499.700	-7,07
2010	1.490.900	-0,58
2011	1.481.300	-0,64
2012	1.407.200	-5,00
2013	1.339.200	-4,83

2014	1.286.700	-3,92
------	-----------	-------

Sumber : BPS Sumatera Utara

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa perkembangan persentase penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu mulai dari tahun 1995-2014 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 1997 persentase penduduk miskin sebesar 48,77 persen dan pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 93,36 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan negatif jika kemiskinan menurun maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada periode 1995-2014 ketika kemiskinan meningkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga ikut meningkat. Hal ini terjadi pada tahun 2001, 2003, dan tahun 2006. Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun tidak selalu meningkat. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan tidak sejalan dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dilihat melalui Tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 1995-2014

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah)
1995	515.600.000
1996	584.000.000
1997	660.800.000
1998	1.298.900.000
1999	1.666.700.000
2000	1.614.200.000
2001	3.852.000.000
2002	4.829.300.000
2003	6.290.100.000
2004	6.081.400.000
2005	6.907.600.000
2006	8.409.600.000
2007	13.648.100.000
2008	3.009.521.195
2009	3.476.698.496
2010	3.827.284.878
2011	4.642.394.869
2012	7.898.946.506
2013	7.360.668.253
2014	7.808.557.310

Sumber : BPS Sumatera Utara

Tabel 1.4 diatas periode 1995-2014 pengeluaran pemerintah dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara hanya empat kali mengalami penurunan yaitu pada tahun 2000 pengeluaran pemerintah turun sebesar 3,14 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 pengeluaran pemerintah turun menjadi Rp. 6.081.400.000 miliar, kemudian pada tahun 2008 pengeluaran pemerintah turun sebesar 77,94 persen dan pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan sebesar 6,81 persen.

Peningkatan pengeluaran pemerintah disebabkan karena salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang

mampu. Sementara rendahnya pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia khususnya di kedua sektor ini. Mengingat kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal pokok untuk mencapai kehidupan yang layak.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **‘Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014’**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diketahui masih banyak masalah yang timbul akibat faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Sumatera Utara. Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.
2. Peningkatan Jumlah penduduk miskin diikuti dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.
3. Pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2000, 2004, 2008 dan tahun 2013 saja pengeluaran pemerintah mengalami penurunan.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian merupakan upaya untuk memfokuskan persoalan yang akan diteliti. Dari beberapa identifikasi masalah yang telah

diuraikan tersebut, peneliti membatasi masalahnya hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat objek yang didefinisikan dan dapat diamati.² Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	Adanya peningkatan pendapatan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengkonsumsi jumlah barang dan jasa lebih banyak dan beragam.	1. Produk domestik regional bruto (PDRB). 2. Pendapatan riil per kapita	Rasio
Tingkat Kemiskinan (X_2)	Suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan diberbagai keadaan hidup.	1. Pengeluaran makanan. 2. Pengeluaran bukan makan	Rasio
Pengeluaran Pemerintah (X_3)	Bagian dari kebijakan fiskal yakni, suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional.	1. Pengeluaran rutin 2. Pengeluaran pembangunan	Rasio

²Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). Hlm. 115.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y)	Suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu Usia Hidup, Pengetahuan, dan Standar Hidup Layak.	1. Angka Harapan Hidup (AHH) 2. Angka Melek Huruf (AMH) 3. Standar Hidup Layak.	Rasio
--------------------------------------	---	---	-------

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014 ?
2. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014 ?
3. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014 ?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014 ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014 .
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

G. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya ekonomi sumberdaya manusia yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dalam menentukan kebijakan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Dunia Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dibidang ekonomi sumberdaya manusia, dan bagi peneliti selanjutnya, dijadikan

sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis. Untuk memperluas pemahaman dan wawasan terhadap teori yang diberikan dalam perkuliahan.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian yang membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional variabel, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Sumatera Utara.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, *Human Development Report 2000*). Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan alat dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan buta huruf.³

Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar terlepas dari hal-hal yang lain, kedua hal itu merupakan hal yang penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya adalah hal yang fundamental untuk

³Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*, (Jakarta: CV. Nario Sari, 2009), hlm. 3.

membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan.⁴

Sejak dimulai pada tahun 1990, tema sentral dari laporan ini adalah pembentukan dan penajaman ulang Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI). Salah satu keuntungan terbesar dari *Human Development Index* (HDI) adalah indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatannya yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar dapat berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia.

Lebih jauh, *Human Development Index* (HDI) menunjukkan dengan jelas bahwa kesenjangan dalam pendapatan lebih besar daripada kesenjangan dalam indikator pembangunan yang lain, paling tidak dalam indikator kesehatan dan pendidikan. *Human Development Index* (HDI) juga mengingatkan kita bahwa pembangunan, yang kita maksud adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Banyak negara, seperti sejumlah negara penghasil minyak yang berpendapatan tinggi, disebut sebagai negara yang mengalami “pertumbuhan tanpa pembangunan”. Kesehatan dan pendidikan bukan hanya input fungsi produksi (seperti dalam perannya sebagai komponen modal manusia) namun juga merupakan tujuan pembangunan yang fundamental.⁵

Pembangunan manusia mencakup dua proses dimana orang-orang melakukan perluasan pilihan-pilihan dan pencapaian tingkat kesejahteraan.

⁴Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. Op., Cit, hlm. 404.

⁵*Ibid.*, Hlm. 68-70.

Salah satu hal penting adalah menjamin kondisi kesehatan hidup dalam jangka panjang, memperoleh pendidikan, dan menikmati standar hidup yang layak. Pilihan tambahan lainnya adalah kebebasan berpolitik dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu bentuk kemampuan manusia yang dapat diperbaiki yaitu kesehatan dan pengetahuan, sementara itu, yang kemampuan lainnya dapat dipergunakan untuk bekerja atau menikmati waktu luang.⁶

Pada tahun 1990, UNDP (*United Nation Development Program*) memperkenalkan sebuah konsep pembangunan yang diberi nama *Human Development*. Konsep ini memprioritaskan pada pencapaian tujuan pembangunan yang menjadikan manusia sebagai fokus pembangunan (*Human Centered Development*). Pencapaian tujuan tersebut dapat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*).

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah suatu indeks yang mengukur pembangunan sosial ekonomi suatu daerah berdasarkan pada pengukuran ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu keunggulan IPM sebagai alat ukur indikator pembangunan adalah fleksibel dalam pengaplikasiannya.⁷

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga digunakan untuk melakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan berbagai negara

⁶Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 222.

⁷*Ibid.*

di dunia. Berdasarkan indeks IPM-nya, negara-negara di dunia ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*), bila memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara 0 sampai 0,50.
- b. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), bila memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara 0,50 sampai 0,79.
- c. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*), bila memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara 0,79 sampai 1.⁸

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara atau daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal pemerintah negara atau daerah tersebut terkait mengenai aspek pembangunan manusianya, bukan hanya pada tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung aspek pembangunan manusia dapat dilihat dari proporsi anggaran pemerintah untuk membangun sektor pendidikan dan kesehatan. Besarnya proporsi anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kedua sektor tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap aspek pembangunan manusia.

Pembangunan berawal dari bertitik tolak dari manusia, dilakukan oleh manusia, maka sudah semestinya ditujukan pula untuk manusia. Di dalam konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini terdapat perpaduan antara

⁸Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi ke- 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 46.

aspek-aspek sosial dan ekonomi. Hal tersebut memungkinkan konsep ini untuk dapat memberikan gambaran yang lebih luas bagi kinerja pembangunan suatu negara.⁹

b. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan Angka Harapan Hidup yaitu Angka Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpark* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Selanjutnya dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya.

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun terendah adalah 25 tahun. Angka ini diambil dari standar *United Nation Development Program (UNDP)*.¹⁰

⁹*Ibid.*, hlm. 48-49.

¹⁰Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*, (Jakarta: CV. Nario Sari, 2008) hlm. 9-10.

2. Angka Melek Huruf

Seperti halnya *United Nation Development Program*(UNDP) komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (*literacy rate*) penduduk 10 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (*mean-years of schooling*). Sebagai catatan, *United Nation Development Program*(UNDP) dalam publikasi tahunan HDR sejak 1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan partisipasi sekolah dasar, menengah dan tinggi karena alasan kesulitan memperoleh datanya sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua kurang sesuai sebagai indikator dampak.

Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

3. Standar Hidup layak

Berbeda dengan *United Nation Development Program* (UNDP) yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjuisted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak. Penulisan ini menggunakan indikator “rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan” (*adjuisted real per capita expenditure*).

Sumber data yang digunakan adalah Susenas dan survey lain yang mendukung.¹¹

c. Prinsip Utama Dalam Ekonomi Pembangunan Islam

Menurut Umer Chapra tujuan dari suatu sistem ekonomi sangat dipengaruhi oleh pandangan dunianya. Salah satunya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana alam semesta muncul, makna dan tujuan hidup manusia, kepemilikan dan penggunaan objektif sumber daya yang langka untuk kehidupan manusia, serta hubungan antar sesama manusia (termasuk hak dan kewajiban mereka) juga pada lingkungan. Sebagai contoh, jika pandangan mengenai alam semesta tercipta dengan sendirinya, maka akibatnya manusia tidak perlu bertanggungjawab pada siapapun dan hidup bebas sesukanya.

Akan tetapi, jika keyakinannya bahwa manusia dan apapun yang dimilikinya diciptakan oleh Maha Pencipta dan mereka bertanggung jawab kepada-Nya, mereka mungkin tidak menganggap diri mereka mungkin benar-benar bebas untuk berkehendak sesuka hati atau seperti pion yang tak berdaya di papan catur sejarah.

Oleh karena cara pandang sangat mempengaruhi hasil akhir dari suatu sistem yang diterapkan maka Islam harus memiliki pandangan dunia yang holistik mencakup unsur kemanusiaan dan ketuhanan.¹²

Islam sebagai tatanan hidup atau agama (din) secara umum terdiri dari 4 hal, yaitu:

¹¹Badan Pusat Statistik. <http://bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2016, pukul 21.10 WIB.

¹²M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm 229-230.

- a. Kebenaran tujuan (visi), yaitu menunaikan ibadah dengan niat yang betul-betul ikhlas.
- b. Memenuhi janji, yaitu melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. atas wahyu-Nya yang benar.
- c. Meninggalkan apa yang dilarang, yaitu mencegah diri dari apa yang diharamkan Allah dan hal-hal yang subhat.
- d. Ketetapan janji, yaitu meyakini apa yang datanya dari Alla, berupa Al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya.

Islam sebagai tata kehidupan pembangunan ekonomi mengimplementasikan 4 faktor tersebut dengan berlandaskan tauhid, khilafah, keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. Dari nilai-nilai itulah akan terbentuk masyarakat yang dididamkan sebagai hasil pembangunan ekonomi dan terwujudnya masyarakat industrial yang Qur'ani, yaitu masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan dengan berbagai potensi sumber daya yang memadai yang telah dipersiapkan oleh Allah SWT.¹³

Hal ini digambarkan Allah dalam firmanNya Q.S Al-'raaf: 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

Artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Q.S Al-'raaf: 96).¹⁴

¹³Ismail Nawawi, *Pembangunan Dalam Perspektif Islam Kajian Ekonom, sosial dan Budaya*.(Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 57.

¹⁴Departemen Agama, Op.,Cit, hlm. 163.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi pembangunan dalam islam yaitu:¹⁵

1. *Tauhid Ulihiyyah*, yaitu percaya pada Kemahatunggalan Allah dan semua yang di alam semesta merupakan kepunyaan-Nya. Dalam konteks upaya pembangunan manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia adalah kepunyaan-Nya sehingga tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kepentingan pribadi.
2. *Tauhid Rububiyah*, yaitu percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menentukan keberlanjutan dan hidup dari ciptaanya serta menurut siapa saja yang percaya kepada-Nya kepada kesuksesan. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak hanya bergantung pada upayanya sendiri, tetapi juga pada pertolongan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada satu titik ekstrem, sikap fatalistic tidak dibenarkan sementara pada titik ekstrem lainnya, kepercayaan sepenuhnya pada upaya-upaya manusia sendiri dianggap tidak adil bagi Sang Pencipta.
3. *Khilafah*, yaitu peranan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Di samping sebagai wakil atas segala sumber daya yang diamanatkan kepadanya, manusia yang beriman juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi teladan atau contoh yang baik bagi manusia lainnya.
4. *Tazkiyyah an-nas*, ini merujuk kepada pertumbuhan dan penyucian manusia sebagai prasyarat yang diperlukan sebelum manusia yang menjalankan tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya. Amnesia

¹⁵Mudrajat Kuncoro, Ph.D, *Masalah, Kebijakan dan Politik: Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2010) hlm.23-24.

adalah agen perubahan dan pembangunan (*agent of change and development*). Oleh karena itu, perubahan dan pembangunan apa pun yang terjadi sebagai akibat upaya manusia ditujukan bagi kebaikan lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi.

5. *Al-falah*, yaitu konsep keberhasilan dalam islam bahwa keberhasilan apapun yang dicapai di kehidupan dunia akan mempengaruhi keberhasilan di akhirat sepanjang keberhasilan yang dicapai semasa hidup di dunia tidak menyalahi petunjuk atau bimbingan yang telah Tuhan tetapkan. Oleh karena itu, tidak ada dikotomi diantara upaya-upaya bagi pembangunan di dunia maupun persiapan bagi kehidupan akhirat.
6. *'Adalah*, tanpa disertai keadilan sosio-ekonomi, persaudaraan yang merupakan satu bagian integral dari konsep-konsep sebelumnya akan tetap menjadi konsep yang tidak memiliki substansi. Rasulullah sangat tegas dalam menghadapi perihal keadilan, bahkan Rasulullah menyamakan ketidakadilan dengan *dzulm* "kegelapan mutlak". Ibnu Taimiyah juga menegaskan akan pentingnya keadilan. "Tuhan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir, tetapi tidak menegakkan negeri yang tidak adil meskipun beriman."¹⁶ Sementara untuk mewujudkan keadilan tersebut setidaknya harus dilakukan dengan cara:
(1) pemenuhan kebutuhan, (2) penghasilan yang diperoleh dari sumber

¹⁶M. Umer Chapra, Op.,Cit, hlm 229-230.

yang baik, (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, (4) pertumbuhan dan stabilitas.¹⁷

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.¹⁸

Definisi ini memiliki tiga komponen, *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang, *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk, *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan dengan tepat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian.

Pendapat Smith mengenai corak pertumbuhan ekonomi mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan

¹⁷*Ibid.*, hlm. 230.

¹⁸M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 57.

terus menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila pasar berkembang, pembagian kerja dan spesialisasi kerja akan terjadi dan belakangan akan menimbulkan kenaikan produktivitas. Kenaikan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perkembangan tersebut dan perkembangan penduduk, akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih besar.¹⁹

Pendapat ini berbeda dengan pandangan Adam Smith yang menyatakan pertambahan populasi akan menambah pasar. Ricardo dan Mill berpendapat pertumbuhan penduduk yang cepat akan menyebabkan tingkat pembangunan kembali turun ke taraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini, pekerja akan menerima upah yang rendah.²⁰

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).²¹

Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

¹⁹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 244.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 246.

²¹ Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara*, (Medan: CV. Rilis Grafika, 2016) hlm. 3.

konstan menggunakan harga pada tahun tertentu (tahun dasar). Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar.²²

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.

²²Nurul Izzah, “ Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Riau Tahun 1994-2013” *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Volume 1, No. 2, Juli-Desember 2015* (<http://e-journal.perpustakaanstainpsp.net/index.php/at-tijarah/article/view/103>, diakses 09 juni 2017 pukul 15.20 WIB).

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.²³

c. Pendapatan Per Kapita

Angka Produk Nasional Bruto (GNP) dan Pendapatan Nasional (Y) meringkas hasil kegiatan ekonomi seluruh bangsa selama satu tahun dalam satu angka. Angka itu, bersama dengan laju perkembangannya, merupakan informasi dan alat analisis yang penting karena memberikan gambaran tentang situasi dan struktur ekonomi kita, taraf perkembangannya, kekuatan dan kelemahannya.

Akan tetapi, angka GNP itu sendiri sebenarnya masih kurang sempurna sebagai tolak ukur untuk mengetahui taraf hidup atau tingkat kemakmuran suatu bangsa. Adapun beberapa kekurangan GNP tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Ada sejumlah besar kegiatan yang sebenarnya termasuk produktif tetapi tidak ikut diperhitungkan. Contoh menyolok adalah pekerjaan para ibu di rumah, yang jelas merupakan kegiatan produktif tetapi tidak ikut dihitung dalam nilai GNP.
2. GNP adalah alat ukur yang bersifat kuantitatif, yang tidak dengan tepat dapat mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup. Misalnya, bila kemajuan teknik produksi menyebabkan suatu barang dapat

²³Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara*, (Medan: CV. Rilis Grafika, 2016) hlm. 4.

²⁴T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004) hlm.187-188.

dihasilkan dengan harga yang lebih murah, angka GNP mungkin malah merosot.

3. GNP hanya mengukur volume produksi, tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang bagaimana pembagian hasil di antara para warga masyarakat. Juga tidak menunjukkan apa-apa tentang komposisi hasil produksi itu: apakah barang-barang yang dihasilkan itu memang berguna/dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, produksi barang-barang mewah yang mahal-mahal itu sangat menaikkan harga GNP, sedangkan rakyat banyak mungkin kekurangan barang-barang kebutuhan hidup pokok, dan beras, gula, garam dan obat-obatan harus diimpor.
4. Kenaikan dalam GNP ada beberapa “efek samping” yang negatif seperti pencemaran udara/lingkungan, kebisingan, penggundulan hutan dan erosi, dan sebagainya yang (sampai sekarang) tidak dikurangkan dari nilai GNP sebagai biaya.

Salah satu sasaran pokok usaha pembangunan negara kita adalah agar laju pertumbuhan penduduk nasional lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan per kepala dapat meningkat. Sekaligus harus diusahakan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja tambahan dan kestabilan nasional.

Ternyata kenaikan pendapatan per kapita dengan beberapa persen (%) setahun belum juga membawa hasil yang diharapkan. Pertumbuhan GNP-di Indonesia seperti di negara-negara lain- masih disertai ketimpangan yang amat besar dalam pembagian pendapatan, juga masih kurang dapat

menampung tenaga kerja yang menganggur atau mencari pekerjaan. Inilah tantangan yang masih kita hadapi dalam usaha pembangunan nasional.²⁵

d. Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu:²⁶

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi infrastruktur ekonomi dan sosial.

Disamping investasi yang bersifat langsung, banyak cara yang bersifat tidak langsung untuk menginvestasikan dana dalam berbagai jenis sumber daya. Pembangunan irigasi akan dapat memperbaiki kualitas tanah pertanian serta meningkatkan produktivitas lahan pertaniannya.

Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Logika konsep investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dan penciptaan modal manusia (*human capital*) ini jelas

²⁵*Ibid.*, hlm. 189.

²⁶Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Op. Cit.*, Hlm. 92.

dapat dianalogikan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya tanah melalui investasi strategis.²⁷

2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang mengacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

Positif atau negatifnya laju pertumbuhan penduduk terhadap perekonomian sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tenaga kerja tersebut. Kemampuan ini lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.²⁸

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Pengertian sederhananya, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional.

²⁷*Ibid.*, hlm. 93.

²⁸*Ibid.*,

Kemajuan teknologi yang netral (*neutral technological progress*) terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Inovasi yang sederhana, seperti pembagian tenaga kerja yang dapat mendorong peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat adalah contohnya.

Kemajuan teknologi hemat modal (*capital-saving technological progress*) merupakan fenomena yang relatif langka. Hal ini dikarenakan hampir semua penelitian dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan di negara maju dengan tujuan utama untuk menghemat pekerja buka menghemat modal.

Kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan modal atau tenaga kerja. Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja (*labor-augmenting technological progress*) terjadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan angkatan kerja secara umum.²⁹

4. Sumberdaya Institusi (Sistem Kelembagaan)

Menurut Rodrik *et.al*, ada empat fungsi institusi dalam kaitannya dengan mendukung kinerja perekonomian yaitu:

- 1) Menciptakan pasar (*market creating*): institusi yang melindungi hak kepemilikan dan memastikan pelaksanaan kontrak.
- 2) Mengatur pasar (*market regulating*): institusi yang bertugas mengatasi kegagalan pasar yakni institusi yang mengatur masalah

²⁹*Ibid.*, hlm. 96.

eksternalitas, skala ekonomi (*economies of scale*), dan ketidaksempurnaan informasi untuk menurunkan biaya transaksi (misalnya: lembaga-lembaga yang mengatur telekomunikasi, transportasi, dan jasa-jasa keuangan).

3) Menjaga stabilitas (*market stabilizing*): institusi yang menjaga agar tingkat inflasi rendah, meminimumkan ketidakstabilan makroekonomi, dan mengendalikan krisis keuangan (misalnya: bank sentral, sistem devisa, otoritas moneter dan fiskal).

4) Melegitimasi pasar (*market legitimizing*): institusi yang memberikan perlindungan sosial dan asuransi, termasuk mengatur redistribusi dan mengelola konflik (misalnya: sistem pensiun, asuransi untuk pengangguran, dan dana-dana sosial lainnya).

Institusi yang kuat akan melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat dan kredibel, sehingga berbagai bentuk kegagalan pasar bisa teratasi. Sebaliknya, institusi yang buruk hanya akan menjadi sebuah beban yang akan senantiasa menghalangi perekonomian untuk bisa bekerja dengan baik.³⁰

b. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Modern

Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “*peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya*”. Ketiga komponen pokok

³⁰Lincoln Arsyad, *Op., Cit*, hlm.276-277

dari definisi ini sangatlah penting maknanya bagi suatu perekonomian yaitu:

1. Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kemampuan suatu perekonomian dalam menyediakan berbagai macam barang ekonomi, dan juga sebagai tanda kematangan ekonomi.
2. Kemajuan teknologi merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun bukan merupakan syarat cukup (*sufficient condition*) dalam merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru, maka
3. Penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi harus segera dilakukan. Adanya inovasi teknologi tanpa disertai adanya inovasi sosial ibarat sebuah bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada namun tanpa *input* yang melengkapi, tidak akan berarti apa-apa.³¹

Dalam analisisnya yang panjang lebar, Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.

³¹*Ibid.*, hlm. 277-278.

5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

Dua faktor yang pertama (nomor satu dan dua) lazim disebut sebagai variabel-variabel ekonomi agregat (*aggregate economic variables*). Sedangkan nomor tiga dan empat biasa disebut variabel-variabel transformasi-struktural. Adapun dua faktor terakhir disebut sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi penyebaran pertumbuhan ekonomi secara internasional.³²

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a) Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut Pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok-stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.³³

³²Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Op. Cit.*, Hlm. 99-100.

³³Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm.433.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaan, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus menerus berlangsung apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahan akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan sangat rendah apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (*Stationary State*). Pada keadaan ini pendapat pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

b) Teori Schumpeter

Teori pertumbuhan Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan

ekonomi.³⁴ Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefesienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan inovasi baru.

Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya mencapai tingkat “tingkat keadaan tidak berkembang” atau “*Stationary State*”. Akan tetapi berbeda dengan klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pandangan ini berbeda dengan pandangan klasik. Seperti yang telah diterangkan, menurut pandangan klasik tingkat tersebut dicapai waktu perekonomian telah berada kembali pada tingkat subsisten, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah.³⁵

c) Teori Harrod-Domar

Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh

³⁴*Ibid.*, hlm. 434.

³⁵*Ibid.*, hlm. 434-435.

dalam jangka panjang.³⁶ Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisahan-pemisahan berikut:

- (a)Barang modal telah mencapai kapasitas penuh.
- (b)Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional.
- (c)Rasio modal-produksi.
- (d)Perekonomian terdiri dari dua sektor.

d. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan sebuah upaya untuk meningkatkan *level of income* masyarakat dan individu dalam jangka panjang, yang diiringi dengan meminimalkan tingkat kemiskinan dan menghindari kerusakan distribusi kekayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tujuan dan fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Konsep pertumbuhan konvensional tidak dinafikan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi memiliki arti berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai iman, takwa, dan konsistensi serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak di menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketertinggalan dan keterbelakangan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.³⁷ Konsep

³⁶*Ibid.*, hlm. 436.

³⁷Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Global*, (Jakarta: Zikrul, 2004), hlm. 140.

pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan dalam Al-Qur'an surah Huud ayat 61 sebagai berikut:

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ٦١

Artinya: dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."³⁸

Lafadz *Imarah* dalam ayat tersebut, bermakna pertumbuhan atau kebangkitan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, dan inilah yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. *Imarah* dimaksudkan bukan hanya sekedar mengejar pertumbuhan materi, tetapi mencakup nilai-nilai spiritual, yaitu beribadah kepada Allah.³⁹

3. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampaisuatu taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas, 2002). Secara garis besar definisi miskin dapat dipilah menjadi dua aspek, yaitu: (1) aspek primer, yaitu berupa miskin asset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan dan (2) aspek

³⁸Departemen Agama Islam RI, *Al-Jumatul'Ali Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al Kautsar. 2009). hlm.228

³⁹Said Sa'ad Marthon. *Op., Cit.* hlm. 141.

sekunder, yaitu berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.

Menurut Ravallion, kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.⁴⁰

b. Pengeluaran Makanan

Nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Teknik perhitungan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference populaion*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. Garis Kemiskinan Sementara (GKS) dihitung berdasar Garis Kemiskinan (GK) periode sebelumnya yang di inflasi dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM).

⁴⁰Lincoln Arsyad. *Op., Cit.* hlm. 299-300

c. Pengeluaran Bukan Makanan

Pengeluaran bukan makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di pedesaan.

Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi diperkotaan dan 12 komoditi di pedesaan, sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.

Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub kelompok yang tercatat dalam data susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil survei Paket Komoditi kebutuhan dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data susenas modul konsumsi.⁴¹

d. Jenis-Jenis Kemiskinan

⁴¹Badan Pusat Statistik. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*.(Jakarta: Sub Direktorat Analisis Statistik, 2008) hlm. 30.

Para ahli membedakan empat Macam kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan sosial-budaya.

1. Kemiskinan absolut, menunjukkan keadaan seseorang atau sekelompok masyarakat yang taraf hidupnya (pendapatannya) begitu rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan bukan makanan).
2. Kemiskinan relatif, berkaitan dengan pembagian pendapatan nasional diantara berbagai lapisan masyarakat, yaitu berapa bagian (%) yang diperoleh golongan masyarakat yang satu dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
3. Kemiskinan struktural, menunjukkan pada ketidakmampuan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh (sebagai akibat dari) struktur masyarakat yang menghalanginya.
4. Kemiskinan sosial-budaya, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat.⁴²

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:⁴³

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasa mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan

⁴²T. Gilarso, *Op., Cit*, hlm. 326-327.

⁴³ Arif Zulkifli Nasution. Kemiskinan atau Poverty. <http://bangazul.com/kemiskinan>. diakses 12 Januari 2016 pukul 20.00 WIB.

dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

e. Indikator Kemiskinan

Ada beberapa macam ukuran yang sering kali digunakan sebagai indikator kemiskinan, antara lain:⁴⁴

1. Tingkat Konsumsi Beras

Sajogyo (1977) menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun dapat digolongkan sebagai penduduk miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun.

Secara lebih terperinci, Sajogyo membagi lagi indikator kemiskinan tersebut menjadi tiga kelompok yaitu:

⁴⁴ Lincoln Arsyad. *Op., Cit.* hlm. 303.

Tabel 2.1
Indikator Kemiskinan

Kategori	Pedesaan	Perkotaan
Melarat	180 kg	270 kg
Sangat Miskin	240 kg	360 kg
Miskin	320 kg	480 kg

Namun, sejak tahun 1979 kategori “melarat” dihilangkan dan kemudian digantikan dengan kategori “nyaris miskin”, yaitu dengan 480 kg di daerah pedesaan dan 720 kg di daerah perkotaan.

2. Tingkat Pendapatan

Kenaikan batas garis kemiskinan disebabkan karena semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Adanya ketimpangan dalam pola pembangunan dan belum termanfaatkannya sumber daya yang ada di pedesaan secara penuh hanya merupakan sedikit dari sekian banyak permasalahan yang menyebabkan keterbelakangan di daerah tersebut.⁴⁵

Di sisi lain, adanya perbedaan yang cukup mencolok pada penetapan garis kemiskinan antara daerah pedesaan dan perkotaan kiranya dapat dimengerti karena dinamika kehidupan yang berbeda antar keduanya (desa dan kota). Penduduk di daerah perkotaan mempunyai kebutuhan yang relatif sangat beragam dibandingkan dengan daerah pedesaan, sehingga mempengaruhi pula pola pengeluaran mereka.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 303-304.

3. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Selain data pendapatan dan pengeluaranada pula berbagai komponen tingkat kesejahteraan lain yang sering digunakan. Kesembilan komponen kesejahteraan tersebut antara lain: kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.

4. Indeks Kemiskinan Manusia

Indeks Kemiskinan Manusia ini banyak memiliki kemiripan dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Menurut UNDP, ada tiga nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan, yaitu:

1. Tingkat kehidupan, dengan asumsi bahwa karena tingkat kesehatan yang begitu rendah, sehingga lebih dari 30 persen penduduk negara-negara terbelakang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun.
2. Tingkat pendidikan dasar, diukur oleh persentase penduduk usia dewasa yang buta huruf, dengan beberapa penekanan tertentu, misalnya hilangnya hak pendidikan pada kaum wanita.
3. Tingkat keamanan ekonomi, diukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap prasarana kesehatan dan air bersih, serta persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang kekurangan gizi.⁴⁶

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 305.

Oleh karena itu, nilai Indeks Kemiskinan Manusia mempresentasikan proporsi jumlah penduduk di suatu wilayah yang “kehilangan” tiga nilai pokok tersebut. Angka Indeks Kemiskinan Manusia yang rendah menunjukkan tingkat kemiskinan yang rendah pula (persentase penduduk yang kehilangan hak atas tiga nilai utama tersebut relatif kecil), begitu pula sebaliknya.

f. Lingkaran Kemiskinan

Konsep lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) ini pertama kali dikenalkan oleh Ragnar Nurkse dalam bukunya yang berjudul *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries* (1953). Nurkse merupakan salah seorang pelopor penelitian tentang masalah pembentukan modal di Negara Sedang Berkembang (NSB).

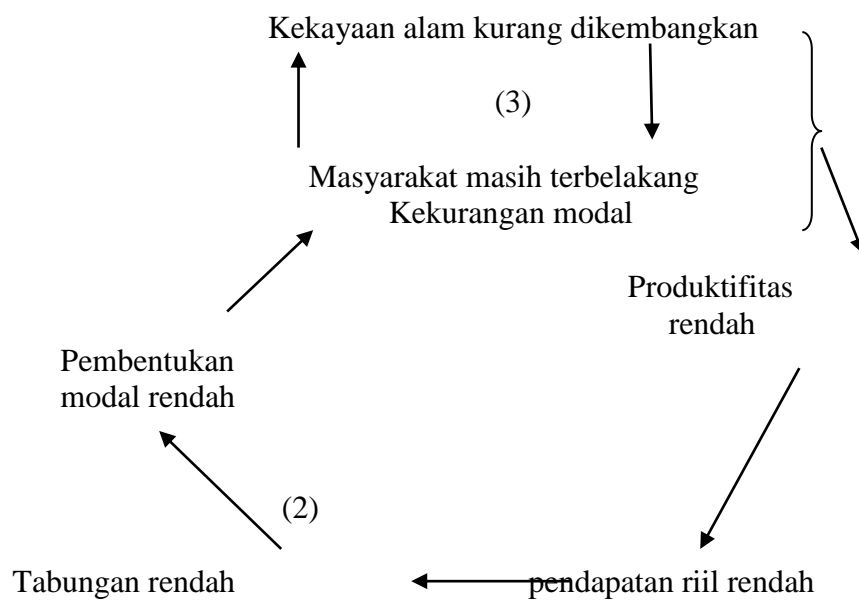
Menurut Nurkse, kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya pembangunan pada masa lalu, tetapi kemiskinan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dimasa mendatang. Sehubungan dengan hal itu, lahirilah sebuah ungkapan Nurkse yang sangat terkenal adalah “*a country is poor because it is poor*”. Salah satu faktor yang diidentifikasi Nurkse sebagai penyebab timbulnya lingkaran kemiskinan adalah adanya hambatan yang sangat kuat dalam proses pembentukan modal.⁴⁷

Pada satu sisi, pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan pada sisi lain pembentukan modal dipengaruhi juga oleh ada tidaknya faktor pendorong investasi. Di NSB, kondisi kedua faktor

⁴⁷*Ibid.* hlm. 111-112.

tersebut tidak memungkinkan untuk terjadinya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi menurut pandangan Nurkse, ada dua jenis lingkaran kemiskinan yang menghalangi NSB untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat yaitu: (1) dari segi penawaran modal, dan (2) dari segi permintaan modal.⁴⁸

Gambar 2.1.
Lingkaran Kemiskinan



Sebagai kesimpulan, pada hakikatnya konsep lingkaran kemiskinan menganggap bahwa: (1) ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup, (2) kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan penanaman modal, dan (3) tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat yang relatif masih rendah, merupakan tiga faktor

⁴⁸*Ibid*, hlm. 112.

utama yang menghambat proses pembentukan modal dan pembangunan ekonomi di berbagai NSB.⁴⁹

g. Kemiskinan Menurut Pandangan Islam

Tidaklah pernah Islam memandang kemelaratan sebagai suatu kehinaan yang menurunkan derajat orangnya. Islam mengambil ukuran bahwa manusia yang paling dekat dengan Allah ialah orang yang paling berbakti. Dengan demikian, kaum yang bagaimanapun melaratnya mungkin lebih tinggi derajatnya dari mereka yang banyak hartanya dan hidup dalam kemegahan.

Islam sangat membenci sifat meminta-minta (mengemis), dan memerintahkan supaya tiap-tiap muslim untuk menjauhinya, sebab tangan diatas yang memberi, lebih baik daripada tangan dibawa yang menerima (meminta). Nabi Muhammad SAW pernah memberikan uang sedirham kepada orang yang meminta-minta dan menyuruhnya untuk dibelikan kampak dan tali, agar dia dapat mencari kayu, sehingga dia tidak hidup dengan cara meminta-minta yang sangat hina tersebut.⁵⁰

Islam mendorong umatnya untuk dapat memperoleh penguasaan atas seluruh alam, sebab menurut Al-Qur'an, seluruh sumber daya di langit dan di bumi telah Allah ciptakan untuk kemakmuran manusia. Tekanan islam disini adalah pada kesejahteraan ekonomi yang berasal dari seluruh alam dan isinya. Islam dirancang sebagai suatu berkat untuk kesejahteraan hidup manusia, yang mengarahkan hidup lebih kaya dan

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 113.

⁵⁰Abdullah Zaky Al kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 223.

menghargai kehidupan dan bukan lebih miskin, penuh dengan kesukaran dan penderitaan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 9:

وَأَيُّخْشَاءِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S An-nisa’: 9).⁵¹

Dalam ayat diatas, Allah menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul kharimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua.⁵²

4. Pengeluaran Pemerintah

a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukannya, yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi. Yang termasuk dalam golongan konsumsi pemerintah adalah pembelian ke atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji

⁵¹Departemen Agama, *Op., Cit*, hlm. 78.

⁵²Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, *Jurnal STAIN Kudus*, Volume 3, No. 2, Desember 2015 (<http://Journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/1268/1127>, diakses 19 Juni 2017 pukul 14.25 WIB).

guru sekolah, membeli alat-alat tulis dan kertas untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah.

Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi. Memberikan beasiswa, bantuan untuk korban banjir, dan subsidi-subsidi pemerintah tidak digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah ke atas produk nasional karena itu bukanlah untuk membeli barang dan jasa.⁵³

b. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis (meskipun hal ini sangat sering dilakukan, terutama oleh pemerintah di negara-negara sedang berkembang), melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum.

Dalam kancah perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilah dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran, yaitu:

1. Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.

⁵³Sadono Sukirno, *Op.Cit.*, hlm. 38.

2. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
3. Peran stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.
4. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju.⁵⁴

c. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan atas penilaian ini kita dapat membedakan bermacam-macam pengeluaran negara seperti:

1. Pengeluaran yang “self-liquidating” sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkatan penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintahan.
3. Pengeluaran yang tidak “self-liquidating” maupun yang tidak reproduktif yaitu pengeluaran yang langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang-

⁵⁴Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga. 1996) hlm. 157-158.

bidang rekreasi, pendirian monument, obyek-obyek tourisme, dan sebagainya.

4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan/perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu.⁵⁵

d. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah

Pada sisi pengeluaran atau belanja negara, pos-pos pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pembelanjaan/pengeluaran pemerintah yang sifatnya rutin, untuk membiayai jalannya roda pemerintahan. Termasuk dalam pembelanjaan/pengeluaran rutin pemerintah yaitu belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan utang, serta pengeluaran rutin lainnya.

a. Belanja pegawai

Termasuk pembelanjaan atau pengeluaran rutin untuk belanja pegawai yaitu pengeluaran untuk gaji pegawai dan pensiun, tunjangan beras, uang makan/lauk pauk, dan lain-lain belanja pegawai dalam negeri.

b. Belanja barang

⁵⁵Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, (Yogyakarta:BPFE. 2000). hlm. 45

Termasuk pengeluaran rutin untuk belanja barang dalam negeri (barang-barang untuk pelaksanaan pemerintahan dalam negeri) dan belanja luar negeri (barang-barang untuk pelaksanaan pemerintahan kita diluar negeri).

c. Subsidi-subsidi.

Termasuk pengeluaran untuk subsidi daerah otonom yaitu pengeluaran untuk subsidi belanja pegawai daerah otonom dan subsidi belanja nonpegawai di daerah otonom.

d. Bunga dan cicilan utang

Pengeluaran untuk bungan dan cicilan utang yaitu pengeluaran untuk pembayaran bunga dan cicilan utang dalam negeri dan pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri.

e. Pengeluaran rutin lainnya

Pengeluaran rutin lain-lain, misalnya subsidi BBM, non-BBM, dan pengeluaran atau pembelanjaan rutin tersebut diatas.

2. Pengeluaran pembangunan

Pembiayaan/pengeluaran pembangunan, yaitu yang tujuannya untuk memajukan kegiatan ekonomi dibidang industri, pertanian, perhubungan, kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, dan lain-lain. Pengeluaran pembangunan sebagian besar digolongkan sebagi investasi dan dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan.

Pembelanjaan/pengeluaran pembangunan ini meliputi pembiayaan rupiah dan bantuan proyek.⁵⁶

a. Pembiayaan rupiah

Termasuk dalam pembiayaan rupiah adalah pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan yang pada departemen atau lembaga dan pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan daerah.

b. Bantuan proyek

Termasuk dalam pembelanjaan ini adalah semua jenis pengeluaran yang berupa peralatan proyek dan tenaga ahli.

e. Dasar Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Adolph Wagner

Pengamatan empiris oleh Adolph Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Ekonom Jerman ini mengukurnya dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Temuannya kemudian oleh Richard A. Musgrave dinamakan “hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat” (*law of growing public expenditures*). Wagner sendiri menamakannya “hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat” (*law of ever increasing state activity*).

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab tersebut adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat

⁵⁶T. Gilarso. *Op., Cit.* hlm. 140.

pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.⁵⁷

2. WW Rostow dan RA Musgrave

WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total-rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional – relatif besar. Hal itu disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan

⁵⁷Dumairy. *Op., Cit.* hlm. 161-162.

prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.⁵⁸

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis “dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah”. Pemerintah selaluberusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. Mengacu pada teori pemungutan suara (*voting*), mereka berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang.

Menurut Peacocok-Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat, yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal tadi terganggu, karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya,

⁵⁸*Ibid.* hlm. 163.

timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*).⁵⁹

Jika pada saat terjadinya gangguan sosial dalam perekonomian timbul efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Efek ini menyatakan bahwa gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perluditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan sosial tersebut. Kesadaran semacam itu menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar, sehingga memungkinkan pemerintah beroleh penerimaan yang lebih besar pula. Inilah yang dimaksudkan dengan analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah.

b. Pengeluaran Pemerintah Dalam Islam

Kebijakan pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Dalam Al-Qur'an telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran pendapatan negara. Jelaslah kegiatan ini tidak diserahkan pada kekuasaan Kepala Negara, juga tidak kepada apa yang disebut

⁵⁹*Ibid.*,

kehendak perundang-undangan modern.⁶⁰ Dalam al-Qur'an, dicantumkan pada surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk kaum fakir, kaum miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, mereka yang berhutang untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶¹

Maksud dari ayat tersebut adalah tentang hukum keuangan Islam memiliki elastisitas yang besar untuk perluasan selanjutnya guna memenuhi persyaratan setiap zaman dan setiap peradaban. Al-Qur'an juga telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran untuk seluruh lapisan masyarakat, Islam menyuruh untuk tidak mengakumulasi kekayaan tetapi menganjurkan untuk lebih banyak melakukan pengeluaran dalam hal ini pengeluaran yang bersifat produktif.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam menguji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan

⁶⁰ Riska Yanty, “Kebijakan Fiskal dan Anggaran Belanja Dalam Islam”. <http://Riskavanti.blogspot.com/2016/06/kebijakan-fiskal-dan-anggaran-belanja-dalam-islam.html>, diakses 10 agustus 2016 pukul 14.25 WIB.

⁶¹Departemen Agama Islam RI, *Op.Cit*, hlm. 216.

kajian pada penelitian penulis. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1	Christina Usmaliadanti (Skripsi)	Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Periode 2007-2009.	Variabel Independen: Kemiskinan. Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia.	Variabel jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel pembangunan manusia, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan manusia.
2	Denni Sulistio Mirza (Jurnal)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.	Variabel Independen: Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi, Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia.	Hasil analisis menunjukkan bahwavariabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
3	Astri Winarti (Skripsi)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012.	Variabel Independen: Kemiskinan. Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dan variabel anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.
4	Mochammad Yuli Arifin (Skripsi)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan,	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwapengeluaran pemerintah sektor

		Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013.	dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan. Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur 2006-2013.
5	Rela Setiaji Nurhaini (Skripsi)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran, Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Subosuka Wonosraten.	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan. Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
6	Meylina Astri (Jurnal)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.	Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan. Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia.

Persamaan dari penelitian Christina Usmaliadanti dengan penulis adalah sama-sama membahas tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan Christina

Usmaliadanti adalah penulis meneliti faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara tahun 1995-2014, dan faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan belanja modal. Sedangkan Christina Usmaliadanti meneliti tentang Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009.

Persamaan dari penelitian Denni Sulistio Mirza dengan penulis adalah sama-sama membahas kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan Denni Sulistio Mirza adalah penulis meneliti faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara, dan faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan Pengeluaran Pemerintah. Sedangkan Denni Sulistio Mirza meneliti tentang Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.

Persamaan dari penelitian Astri Winarti dengan penulis adalah sama-sama membahas tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan Astri Winarti adalah penulis meneliti faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014, dan faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan Pengeluaran Pemerintah. Sedangkan Astri Winarti meneliti tentang Analisis

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012.

Persamaan dari penelitian Mochammad Yuli Arifin dengan penulis adalah sama-sama membahas pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan Mochammad Yuli Arifin adalah penulis meneliti faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014, dan faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan Pengeluaran Pemerintah. Sedangkan Mochammad Yuli Arifin meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013.

Persamaan dari penelitian Reli Setiaji Nurhaini dengan penulis adalah sama-sama membahas pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan Reli Setiaji Nurhaini adalah penulis meneliti faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014, dan faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Sedangkan Reli Setiaji Nurhaini meneliti tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran,

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Subosuka Wonosraten.

Persamaan dari penelitian Meylani Astri dengan penulis adalah sama-sama membahas pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan Meylani Astri adalah penulis meneliti faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014, dan faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Sedangkan Meylani Astri meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran akan peta peneliti mengenai batas-batas yang akan diselidiki dan yang tidak akan tersentuh oleh proses penelitian. Kerangka pemikiran yang baik berisi kerangka pikir yang disusun berdasarkan identifikasi masalah.⁶²

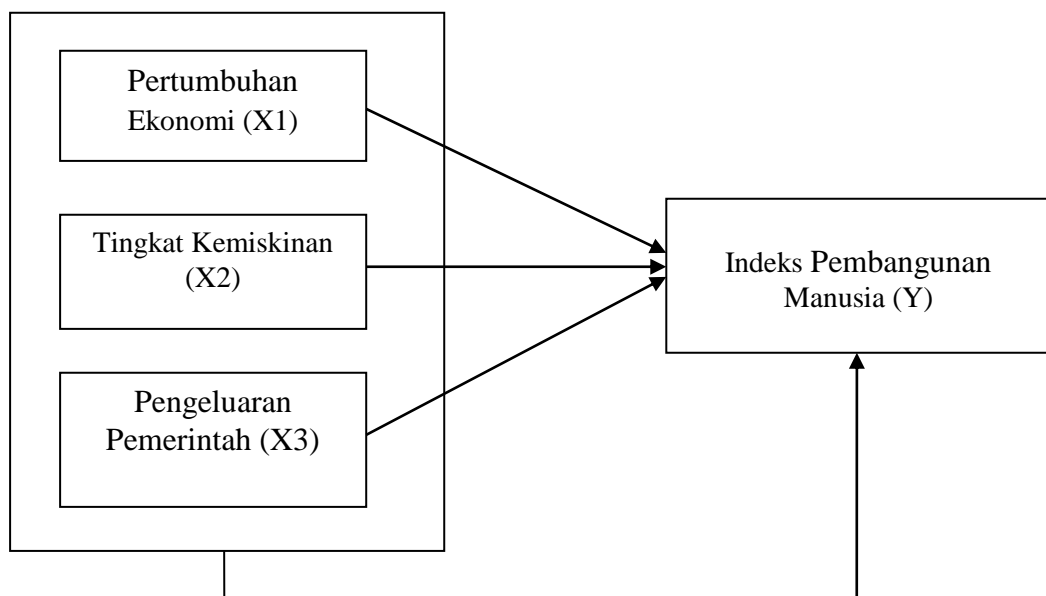
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya

⁶²Hendri Tanjung dan Abrista Dewi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2013), hlm. 62.

perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercerminkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks yang mengukur pembangunan sosial ekonomi suatu daerah berdasarkan pada pengukuran ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara, maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014. Kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini.

Gambar 2.2.
Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berpikir deduktif (logika deduktif). Logika deduktif adalah menganut koherensi, mengingat premis merupakan informasi yang bersumber dari pernyataan yang telah teruji kebenarannya, maka hipotesis yang akan dirumuskan akan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dari premis.⁶³

Berdasarkan rumusan masalah yang sebagaimana telah diuraikan maka yang menjadi hipotesis yaitu sebagai berikut:

H_{01} = Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

H_{a1} = Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

H_{02} = Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

H_{a2} = Tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

H_{03} = Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

H_{a3} = Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

⁶³Muhammad. *Op.Cit.*, Hlm. 76.

H_{04} = Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

H_{a4} = Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan rentang waktu 1995-2014. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2017.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan atau pengaruh yang terukur, meramalkan dan mengontrol.⁵³

Data yang digunakan diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014, yang meliputi data pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengeluaran pemerintah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014. Data pertumbuhan ekonomi diwakili oleh data produk domestik regional bruto (PDRB), sedangkan data kemiskinan diwakili oleh data jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Adapun sistem pengolahan data ini adalah dengan menggunakan software *e-views* 9.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

⁵³Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung :Alfabeta, 2006), hlm. 55

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁴ Maka, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian objek yang mewakili populasi yang dipilih dengan cara tertentu.⁵⁵ Atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁶

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁵⁷ Adapun kriteria dalam pengumpulan sampel yaitu tersedianya laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

Sampel dalam penelitian ini yaitu data pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 sampel.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 80.

⁵⁵Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Mulia, 2014), hlm. 51.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 116.

⁵⁷Muhammad, *Op., Cit*, hlm. 152.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.⁵⁸ Data yang dihimpun adalah data pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan yang diambil dari data jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semua data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Sumatera Utara dalam angka berbagai edisi yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

5. Teknik Analisis Data

Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasikan data dengan tujuan untuk mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya sehingga memiliki makna dan arti yang lebih jelas sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Analisis Regresi Berganda

Regresi dapat dikatakan linear berganda jika variasi peubah yang akan diperkirakan, dijelaskan oleh variasi dari beberapa peubah penjelas (lebih dari satu peubah penjelas) artinya terdapat beberapa variabel independen yaitu X_1, X_2, X_3 yang mempengaruhi satu variabel dependen (Y). Adapun bentuk persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 PE + \beta_2 TK + \beta_3 PP + e$$

⁵⁸Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 102.

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

β_0 = Konstanta

PE = Pertumbuhan Ekonomi

TK = Tingkat Kemiskinan

PP = Pengeluaran Pemerintah

$\beta_1\beta_2\beta_3$ = Koefisien

e = *Error*

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan metode JB (*Jarque Bera*), sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya.⁵⁹ Untuk melihat apakah regresi data normal adalah bahwa jika nilai-nilai $p \geq 0.05$ maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika nilainya $p < 0.05$ maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Nilai p juga dapat dilihat dari nilai Kolmogorov Smirnov Z.

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel penjelas

⁵⁹Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Statistika Ekonomi*, (Yogyakarta: Tim Redaksi Caps. 2012), hlm. 181.

(bebas) dari model regresi ganda.⁶⁰ Untuk mendeteksi apakah model regresi linear mengalami multikolinearitas, dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Faktor* (VIF) untuk masing-masing variabel independen, yaitu jika suatu variabel independen mempunyai nilai $VIF > 10$ berarti telah terjadi multikolinearitas yang serius didalam model regresi linear, sehingga variabel tersebut harus dihilangkan dari model regresi tersebut.

3) Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linier, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan.

Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier adalah dengan melihat nilai Prob. F-statistic (F hitung). Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka H_0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka H_0 ditolak yang artinya terjadi heteroskedastisitas.⁶¹

4) Uji Autokorelasi

Data yang digunakan untuk mengestimasi model regresi linier merupakan data *time series* maka diperlukan asumsi bebas autokorelasi. Guna memastikan apakah model regresi linier terbebas dari

⁶⁰Setiawan dan Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010), hlm. 82.

⁶¹ Muhammad Iqbal. Pengolahan Data dengan Regresi Linier Berganda (dengan Eviews). <http://dosen.perbanas.id/uploads/2015/08/-analisis-regresi-berganda-eviews>. diakses 06 Juni 2017 pukul 13.25 WIB.

autokorelasi, dapat menggunakan metode Brusch-Godfrey atau LM (*Lagrange Multiplier*) Test.

Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F hitung yang jika lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, berdasarkan uji hipotesis, H_0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi.⁶²

5) Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi. Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari variasi total yang dapat diterangkan oleh model.⁶³

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat apakah semua koefisien regresi berbeda dengan nol secara signifikan atau *p-value* sangat kecil.⁶⁴ Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

⁶²*Ibid.*, hlm. 15-16.

⁶³Setiawan dan Dwi Endah Kusriani. *Op., Cit.* hlm. 64

⁶⁴Schchrul R. Ajija, dkk, *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, (Jakarta: Salemba Empat. 2011). Hlm. 34.

c. Uji t

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel penduga atau variabel bebas. Koefisien penduga perlu berbeda dari nol secara signifikan atau *p-value* sangat kecil.⁶⁵

Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai Prob. t hitung (ditunjukkan pada Prob.) lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila nilai *prob.* t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Muhammad Iqbal. *Op., Cit.* hlm. 25

BAB IV

HASIL PENELITIAN

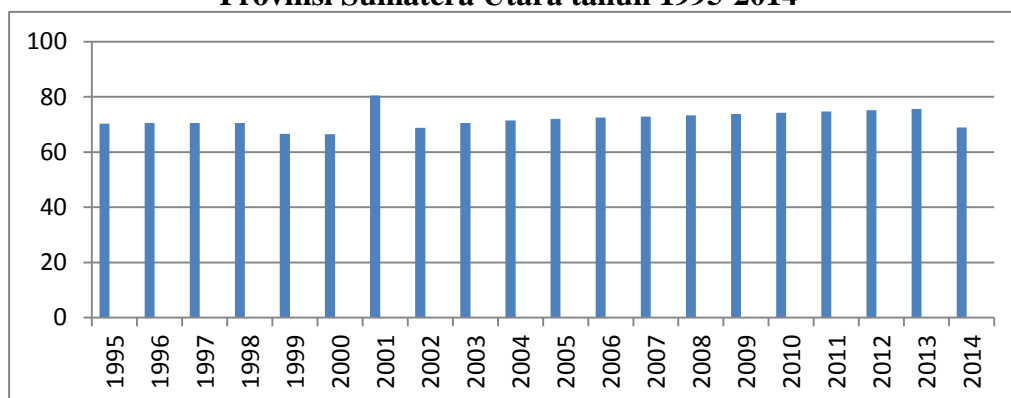
A. Gambaran Umum Variabel

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses perubahan kualitas manusia menuju kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara tetapi juga harus diukur dari tingkat pencapaian pembangunan manusia itu sendiri. Pembangunan manusia perlu mendapat perhatian serius karena banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1995 sampai tahun 2014 mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini:

Gambar 4.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014



Sumber: *Badan Pusat Statistik Sumatera Utara*

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami fluktuasi. Tingkat pembangunan manusia mengalami penurunan pada tahun 1999 mencapai 5,57 persen. Hal ini disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Pada tahun 2006 sampai tahun 2013 IPM terus mengalami peningkatan, dan pada tahun 2014 IPM kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,68 persen. IPM paling tinggi terjadi pada tahun 2001 mencapai 21,19 persen.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terjadi karena membaiknya tingkat daya beli masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikannya dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, proses pembangunan sampai saat ini selain dapat memperbaiki daya beli masyarakat menjadi lebih baik, juga mampu meningkatkan kapasitas fisik (kesehatan) masyarakat, dan intelektual penduduk.

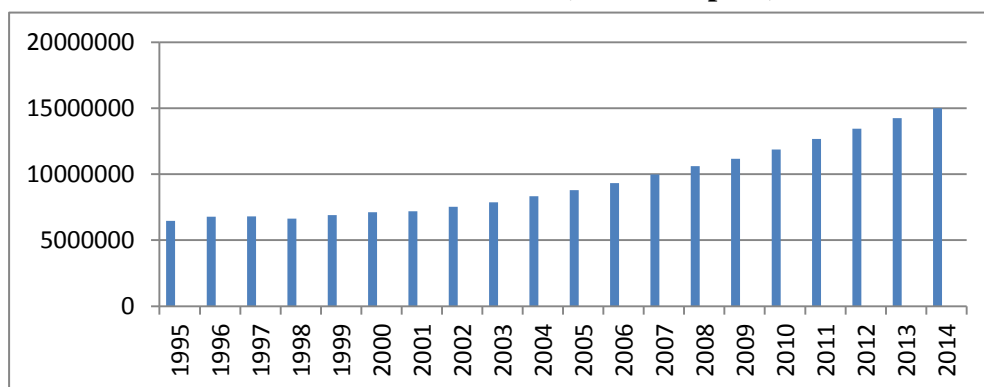
2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik ditingkat nasional maupun regional (daerah). Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor atau lapangan usahanya di suatu domestik atau agregat.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000, dari

tahun 1995 sampai tahun 2014 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1998 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami penurunan sebesar 2,54 persen yang diakibatkan terjadinya krisis ekonomi 1998. Selanjutnya PDRB terus meningkat hingga tahun 2014 telah mencapai Rp. 152.782.22 miliar. Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014.

Gambar 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014 (Miliar Rupiah)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Sumatera Utara*

Berdasarkan data pada Gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 2,54 persen yang diakibatkan terjadinya krisis ekonomi 1998. Selanjutnya PDRB terus meningkat hingga tahun 2014 telah mencapai Rp.152.782.22 miliar. Peningkatan ini terjadi karena transformasi struktur ekonomi di Sumatera Utara dari provinsi berbasis primer (pertanian) menjadi provinsi berbasis industri.

3. Kemiskinan

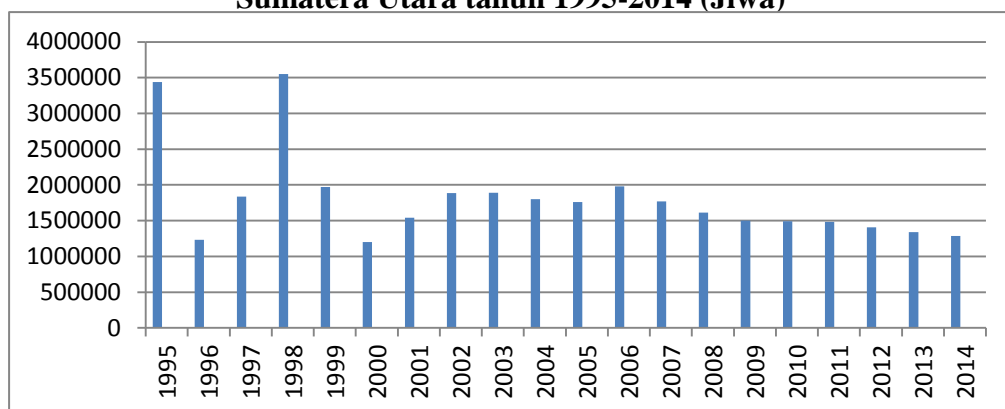
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan,

pendidikan, dan sebagainya. Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan. Karena itu, pemerintah Indonesia harus terus memberdayakan dan membina masyarakat miskin untuk dapat mengelola sumber-sumber ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berikut ini perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1995-2014 dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014 (Jiwa)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Sumatera Utara*

Pada Gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa perkembangan penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu mulai dari tahun 1995-2014 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 1997 jumlah penduduk miskin sebanyak 1.836.203 jiwa dan pada tahun 1998 jumlah

penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 93.36 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998.

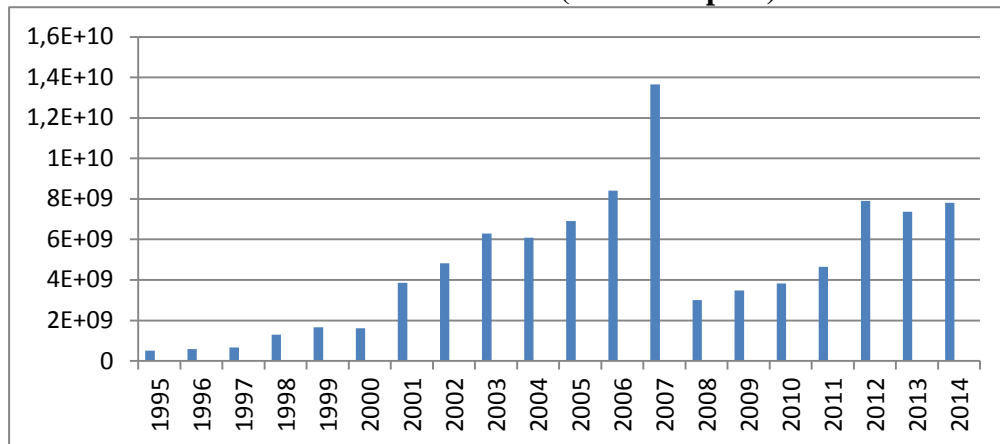
Penurunan tingkat kemiskinan ini diikuti dengan berbagai program pemerintah yang terus memberdayakan masyarakat melalui berbagai kegiatan diantaranya, pembangunan yang menyeluruh yang mencakup bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, termasuk program Keluarga Berencana (KB), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) serta prasarana pendukungnya.

4. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas penduduk untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan meningkatkan produktivitas penduduk sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.

Perkembangan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1995 sampai tahun 2014 cenderung mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.4 di bawah ini:

Gambar 4.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2014 (Miliar Rupiah)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Sumatera Utara*

Pada Gambar 4.4 diatas menunjukkan pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara hanya empat kali mengalami penurunan yaitu pada tahun 2000 pengeluaran pemerintah turun sebesar 3,14 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 pengeluaran pemerintah turun menjadi Rp. 6.081.400.000 miliar, kemudian pada tahun 2008 pengeluaran pemerintah turun sebesar 77,94 persen, dan pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan sebesar 6,81 persen.

Jumlah pengeluaran pemerintah ditentukan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika PAD tinggi maka pengeluaran pemerintah juga tinggi termasuk untuk belanja kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan sebagainya. Sebaliknya juga demikian, jika PAD rendah maka pengeluaran pemerintah juga rendah.

Peningkatan pengeluaran pemerintah disebabkan karena salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah meningkatkan

kesejahteraan melalui pemberian pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sementara rendahnya pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia khususnya dikedua sektor ini. Mengingat kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal pokok untuk mencapai kehidupan yang layak.

B. Hasil Estimasi

1. Hasil Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu analisis atau metode statistika dimana untuk menentukan kemungkinan bentuk hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat secara bersama-sama. Data ini diolah menggunakan program *evIEWS* 9. Hasil estimasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Hasil Estimasi

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.362285	0.573450	5.863260	0.0000
Pertumbuhan Ekonomi	0.056232	0.035265	1.594531	0.1304
Kemiskinan	-0.006374	0.006048	-1.053935	0.3076
Pengeluaran Pemerintah	0.000769	0.000216	3.565648	0.0026
R-squared	0.539971	Mean dependent var		4.274814
Adjusted R-squared	0.453716	S.D. dependent var		0.045227
S.E. of regression	0.033428	Akaike info criterion		-3.782017
Sum squared resid	0.017878	Schwarz criterion		-3.582871
Log likelihood	41.82017	Hannan-Quinn criter.		-3.743142
F-statistic	6.260144	Durbin-Watson stat		1.964019
Prob(F-statistic)	0.005144			

Sumber: Hasil *output evIEWS versi 9*

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4.1 diatas, maka persamaan analisis regresi linier berganda penelitian adalah:

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 PE + \beta_2 TK + \beta_3 PP + e$$

$$IPM = 3,362285 + 0,056232PE - 0,006374TK + 0,000769PP + e$$

Persamaan hasil regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

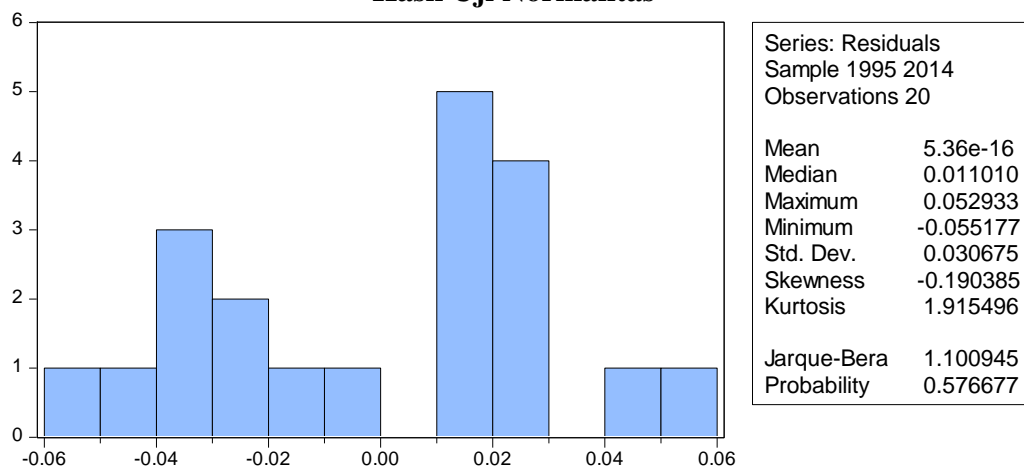
- a. Nilai konstanta sebesar 3.362285 yang artinya apabila pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah dianggap konstan maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 3 persen.
- b. Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.056232, artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sebesar 0,56 persen. Tanda positif menunjukkan adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM. Artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka IPM juga meningkat dan jika pertumbuhan ekonomi menurun maka IPM juga ikut menurun.
- c. Nilai koefisien kemiskinan adalah -0.006374 yang artinya jika kemiskinan naik sebesar 1 persen maka variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan sebesar 0.06 persen. Tanda (-) negatif menunjukkan adanya hubungan negatif antara kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya jika kemiskinan menurun maka IPM meningkat dan sebaliknya.
- d. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah sebesar 0.000769, artinya jika variabel pengeluaran pemerintah naik sebesar 1 persen maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.007 persen. Tanda positif menunjukkan adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan IPM . Artinya jika pengeluaran pemerintah meningkat maka IPM meningkat, dan jika pengeluaran pemerintah menurun maka IPM juga akan mengalami penurunan.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan metode J-B (*Jarque Bera*) test dimana jika nilai probabilitas J-B (*Jarque Bera*) hitung lebih besar dari tingkat alpha 5 persen maka nilai residual berdistribusi normal dan sebaliknya. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.5
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil *output e views* versi 9

Berdasarkan Gambar 4.5 di atas diperoleh nilai probability J-B hitung sebesar 0,576677. Nilai ini lebih besar dari alpha 0,05 atau $0,576677 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui adanya keterikatan antara variabel independen, dengan kata lain bahwa

setiap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Hasil uji multikolinieritas ditentukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), yakni apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 atau 5 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.328845	5885.889	NA
Pertumbuhan Ekonomi	0.001244	5715.324	1.674127
Kemiskinan	3.66E-05	4.946273	1.735670
Pengeluaran Pemerintah	4.65E-08	1.990217	1.057497

Sumber: Hasil *output eviews versi 9*

Tabel 4.2 diatas menunjukkan nilai *Variance Inflation Vactor* (VIF) dari ketiga variabel adalah lebih kecil dari 10 atau 5, yakni nilai VIF pertumbuhan ekonomi sebesar 1.674127,nilai VIF kemiskinan sebesar 1.735670 dan nilai VIF pengeluaran pemerintah 1.057497. Maka data penelitian yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengeluaran pemerintah bebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual model yang diamati memiliki atau tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya. Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi heterokedastisitas. Keputusan terjadi atau tidaknya heterokedastisitas pada model regresi linier adalah dengan melihat nilai probabilitas *F-statistic* (F hitung), apabila nilai F hitung lebih besar dari tingkat alpha maka H_0 diterima atau tidak terjadi heterokedastisitas dan

sebaliknya. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Heterokedastisitas

F-statistic	0.724432	Prob. F(3,16)	0.5521
Obs*R-squared	2.391747	Prob. Chi-Square(3)	0.4952
Scaled explained SS	1.025223	Prob. Chi-Square(3)	0.7951

Sumber: Hasil *output eviws versi 9*

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas menunjukkan nilai prob. F(3,16) adalah 0,5521. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,5521 > 0,05$). Artinya nilai F hitung lebih besar dari alpha maka H_0 diterima atau tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan penggolongan asumsi klasik yang menyatakan bahwa dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi antar *error term*. Autokorelasi dilihat dengan cara membandingkan nilai probabilitas F hitung dengan alpha (0,05). Jika F hitung lebih besar dari alpha maka H_0 diterima atau tidak terjadi autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

F-statistik	0.645060	Prob. F(2,14)	0.5395
Obs*R-square	1.687520	Prob. Chis-Square(2)	0.4301

Sumber: Hasil *output eviws versi 9*

Nilai probabilitas F hitung pada tabel di atas adalah 0,5395. Nilai ini lebih besar daripada nilai alpha 0,05 atau $0,5395 > 0,05$. Maka H_0 diterima atau tidak terjadi autokolerasi dalam penelitian ini.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai prob. t-statistik lebih kecil dari tingkat signifikan (0,05) maka suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji t-test dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Uji t

Variabel	Coefficient	Prob.	$\alpha = 5\%$	Kesimpulan
(Constan)	3.362285	0.0000	0.05	-
Pertumbuhan Ekonomi	0.056232	0.1304	0.05	Tidak Signifikan
Kemiskinan	-0.006374	0.3076	0.05	Tidak Signifikan
Pengeluaran Pemerintah	0.000769	0.0026	0.05	Signifikan

Sumber: Hasil *output eviews versi 9*

Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.5 diatas, apabila nilai prob. t-statistic lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Sedangkan apabila nilai prob. t-statistik lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Berikut merupakan hasil uji t dari masing-masing variabel bebas.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui nilai prob. t-statistik dari pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1304, nilai tersebut lebih besar dari

alpha 0,05 atau $0.1304 > 0.05$. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2) Kemiskinan

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui nilai prob. t-statistik dari kemiskinan sebesar 0.3076, nilai tersebut lebih kecil dari alpha 0,05 atau $0.3076 > 0.05$. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3) Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui nilai prob. t-statistik dari pengeluaran pemerintah sebesar 0.0026, nilai tersebut lebih kecil dari alpha 0,05 atau $0.0026 < 0.05$. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 4 dan jumlah observasinya adalah 20. Uji ini akan membandingkan nilai *p-value* dengan α . Jika *p-value* $< \alpha$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika *p-value* $> \alpha$ maka H_0 diterima. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji F

F-statistic	6.260144
Prob(F-statistic)	0.005144

Sumber: Hasil *output Eviews versi 9*

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa hasil pengujian data diperoleh nilai prob. F-statistic lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0.005144, maka H_0 ditolak. Artinya, semua variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (X1), kemiskinan (X2), dan pengeluaran pemerintah (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y) di Provinsi Sumatera Utara.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak dengan variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Uji koefisien determinan (R^2) dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7
Uji Koefisien Determinan (R^2)

R-squared	0.539971
Adjusted R-squared	0.453716
S.E. of regression	0.033428
Sum squared resid	0.017878
Log likelihood	41.82017

Sumber: Hasil *output eviews versi 9*

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, nilai *R-Square* diperoleh sebesar 0.53997. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu dijelaskan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah sebesar 53,99 persen. Sedangkan sisanya sebesar 46,01 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Hal ini berarti masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

C. Pembahasan dari Penelitian

Penelitian ini berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014. Adapun faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah. Dari hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan program *Eviews versi 9*, menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinan sebesar 0.539971. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu dijelaskan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah sebesar 53,99 persen. Sedangkan sisanya sebesar 46,01 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Perhitungan statistik dengan menggunakan *E-views* yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa regresi yang dihasilkan cukup baik untuk

menerangkan variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model penelitian ini, ternyata tidak semua variabel bebas berpengaruh signifikan dalam penelitian ini.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya hasil interpretasi dari hasil regresi tersebut terhadap signifikan masing-masing variabel yang diteliti dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0,056232, artinya pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,056232. Adapun dengan menggunakan uji t pada tingkat signifikan 5 persen, pertumbuhan ekonomi memiliki nilai prob. t-test sebesar 0,1304 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya setiap ada peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebabkan karena masih banyak

permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan. Misalnya, kemiskinan yang masih cukup tinggi, dan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Hasil penelitian ini didukung oleh Robert M. Solow, di dalam buku yang berjudul “Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga Edisi Kedelapan”, menyatakan bahwa pertumbuhan output bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor yaitu, kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal dan peningkatan teknologi. Sedangkan salah satu alat pengukur pembangunan kualitas dan kuantitas tenaga kerja adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu Mochammad Yuli Arifin dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013”. Dalam penelitian tersebut variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2006-2013. Artinya, setiap kali terjadi peningkatan perekonomian tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien kemiskinan sebesar -0,006374, artinya

kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika kemiskinan naik 1 persen maka variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami penurunan sebesar 0,006374. Adapun dengan menggunakan uji t pada tingkat signifikan 5 persen, kemiskinan memiliki nilai prob. t-test sebesar 0,3076 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan jika kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya tingkat kemiskinan secara langsung tidak berpengaruh terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebabkan oleh program-program pengentasan kemiskinan selama ini belum berjalan efektif, karena program kemiskinan ini masih sering salah sasaran. Misalnya, orang miskin yang tidak bisa membayar uang sekolah anaknya, malah mendapatkan bantuan beras miskin (raskin).

Hasil penelitian ini didukung oleh Ragnar Nurkse di dalam buku yang berjudul "Ekonomi Pembangunan Edisi 5" dalam salah satu konsepnya, yaitu lingkaran kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), dengan jelas mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya lingkaran setan kemiskinan adalah adanya hambatan dalam pembentukan modal. Lingkaran setan kemiskinan itu dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi dimana sebuah negara (atau masyarakat dalam

satu negara) akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan dalam mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu Dedy Pudja Wardana dengan judul “Pengaruh Pembangunan ekonomi terhadap Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur”. Dalam penelitian tersebut variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak mempunyai efek atau pengaruh secara langsung terhadap masalah pencapaian pembangunan manusia melalui program-program pengentasan kemiskinan.

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah menunjukkan tanda positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisien pengeluaran pemerintah sebesar 0.000769, artinya jika variabel pengeluaran pemerintah naik sebesar 1 persen maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 0.007 persen.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang terdapat di dalam buku yang berjudul “Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga Edisi Kedelapan”, dimana HDI menunjukkan bahwa kesenjangan dalam pendapatan lebih besar daripada kesenjangan dalam indikator pembangunan yang lain, paling tidak dalam indikator kesehatan dan pendidikan. *Human Development Index* (HDI) juga mengingatkan bahwa pembangunan yang

dimaksud adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Banyak negara, seperti sejumlah negara penghasil minyak yang berpendapatan tinggi, disebut sebagai negara yang mengalami “pertumbuhan tanpa pembangunan”. Kesehatan dan pendidikan bukan hanya input fungsi produksi (seperti dalam perannya sebagai komponen modal manusia) namun juga merupakan tujuan pembangunan yang fundamental.

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, terlepas dari hal-hal yang lain, kedua hal itu merupakan hal yang penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan jika pengeluaran pemerintah (kesehatan dan pendidikan) baik atau meningkat, maka pembangunan manusia juga ikut baik atau mengalami peningkatan juga.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu Meylina Astri dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan secara serempak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah yang disusun sedemikian rupa agar dapat memperoleh hasil yang baik. Namun dalam prosesnya untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit. Sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Beberapa keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Keterbatasan bahan materi dari skripsi ini, seperti kurangnya buku-buku yang menjelaskan lebih detail tentang variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.
2. Keterbatasan dalam penggunaan variabel independen, yang hanya menggunakan 3 variabel independen. Sedangkan masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi variabel dependen sebesar 53,99 persen, sebagaimana yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi R-square.
3. Walaupun demikian, peneliti tetap berusaha sekuat tenaga agar segala keterbatasan yang dihadapi peneliti tidak mengurangi makna dari penelitian ini. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras dan bantuan dari semua pihak baik dosen dan teman-teman, skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara dimana nilai probabilitas adalah sebesar 0,1304, nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5 persen ($0,1304 > 0,05$).
2. Kemiskinan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara dimana nilai probabilitas adalah sebesar 0,3076, nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5 persen ($0,3076 > 0,05$).
3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara dimana nilai probabilitas adalah sebesar 0,0026, nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5 persen ($0,0026 < 0,05$).
4. Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai F statistik ($0,005144 < 0,05$).

B. Saran

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini diperlukan usaha pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan.
2. Pemerintah sebaiknya lebih selektif lagi dalam memberikan program-program kemiskinan, agar tidak terjadi kesalahan dalam menyalurkan program-program tersebut.
3. Pemerintah sebaiknya meningkatkan anggaran pengeluaran pemerintah, untuk sektor pendidikan dan kesehatan, dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) dan kualitas hidup masyarakat.

DATAR PUSTAKA

- Abdullah Zaky Al kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Mulia, 2014.
- Arif Zulkifli Nasution. 2015. Kemiskinan atau Poverty. <http://bangazul.com/kemiskinan>. (12 Januari 2016).
- Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*. Jakarta: CV. Nario Sari, 2009.
- Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*. Jakarta: CV. Nario Sari, 2008.
- Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara*, Medan: CV. Rilis Grafika, 2016.
- Badan Pusat Statistik. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*. Jakarta: Sub Direktorat Analisis Statistik, 2008.
- Badan Pusat Statistik. <http://bps.go.id/>. (10 Maret 2016)
- Chistina Usmaliadanti, " *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009*". Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011. (17 Mei 2017).
- Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Statistika Ekonomi*. Yogyakarta: Tim Redaksi Caps. 2012.
- Departemen Agama Islam RI, *Musaf Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta Timur: CV. Pustaka Al Kautsar. 2009.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga. 1996.
- Hendri Tanjung dan Abrista Dewi, *Metode Penelitian Ekomi islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Ismail Nawawi, *Pembangunan Dalam Perspektif Islam Kajian Ekonom, sosial dan Budaya*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi ke- 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*. Terjemahan oleh Haris Munandar, Puji A.L., Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mudrajat Kuncoro, Ph.D, *Masalah, Kebijakan dan Politik: Ekonomika Pembangunan*, Jakarta:Penerbit Erlangga, 2010.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Iqbal. Pengolahan Data dengan Regresi Linier Berganda (dengan Eviews). <http://dosen.perbanas.id/uploads/2015/08/-analisis-regresi-berganda-eviews>. (06 Juni 2017).
- Nurul Izzah, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Riau Tahun 1994-2013” *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan*, volume 1, No 2, juli-Desember 2015 (<http://e-journal.perpustakaanstainpsp.net/index.php/at-tijaroh/article/view/103>). (09 juni 2017).
- Sadono Sukirno. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- _____. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Said Sa'ad Marthon. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Global*. Jakarta: Zikrul, 2004.
- Schchrul R. Ajija, dkk, *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Setiawan dan Dwi Endah Kusri, *Ekonometrika*, Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta, 2006.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- _____, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, Yogyakarta: BPFE. 2000.

T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius. 2004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI PRIBADI

- I.**
- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| Nama | :Siti Muninggar |
| Nim | : 12 230 0204 |
| Tempat/tanggallahir | : Sidorejo, 03 Oktober 1994 |
| JenisKelamin | : Perempuan |
| Alamat | : Sidorejo |
| Agama | : Islam |
| No. Telp | : 0813 6154 3559 |
- II.**
- | | |
|---------------|--------------------|
| Nama Orangtua | |
| Nama Ayah | : Mariadi |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Nama Ibu | : Erni Suryani |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Sidorejo |

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2000-2006 : SD Negeri 200509 Perk. Pulo bauk
2. Tahun 2006-2009 : SMP Negeri 8 Padangsidimpuan
3. Tahun 2009-2012 : SMA Negeri 8 Padangsidimpuan
4. Tahun 2012-2017 : S-1 Ekonomi Syariah IAIN
Padangsidimpuan

Lampiran 1

Daftar Data Produk Domestik Regional Bruto (X1), Jumlah Penduduk Miskin (X2), Pengeluaran Pemerintah (X3) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y) Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014

Tahun	PDRB (Miliar)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Pengeluaran Pemerintah (Miliar)	Indeks Pembangunan Manusia (%)
1995	64.753.80	3.439.020	515.600.000	70,23
1996	67.714.73	1.234.194	584.000.000	70,50
1997	68.065.40	1.836.203	660.800.000	70,51
1998	66.332.68	3.550.642	1.298.900.000	70,53
1999	68.910.08	1.972.700	1.666.700.000	66,60
2000	71.116.21	1.199.900	1.614.200.000	66,42
2001	71.908.35	1.541.895	3.852.000.000	80,50
2002	75.189.50	1.883.890	4.829.300.000	68,80
2003	78.806.68	1.889.400	6.290.100.000	70,50
2004	83.328.94	1.800.100	6.081.400.000	71,40
2005	87.897.79	1.760.228	6.907.600.000	72,03
2006	93.347.40	1.979.702	8.409.600.000	72,46
2007	99.792.27	1.768.500	13.648.100.000	72,78
2008	106.172.36	1.613.800	3.009.521.195	73,29
2009	111.559.22	1.499.700	3.476.698.496	73,80
2010	118.640.90	1.490.900	3.827.284.878	74,19
2011	126.590.21	1.481.300	4.642.394.869	74,65
2012	134.460.10	1.407.200	7.898.946.506	75,13
2013	142.537.12	1.339.200	7.360.668.253	75,55
2014	149.991.81	1.286.700	7.808.557.310	68,87

Sumber: BPS Sumatera Utara

Lampiran 2

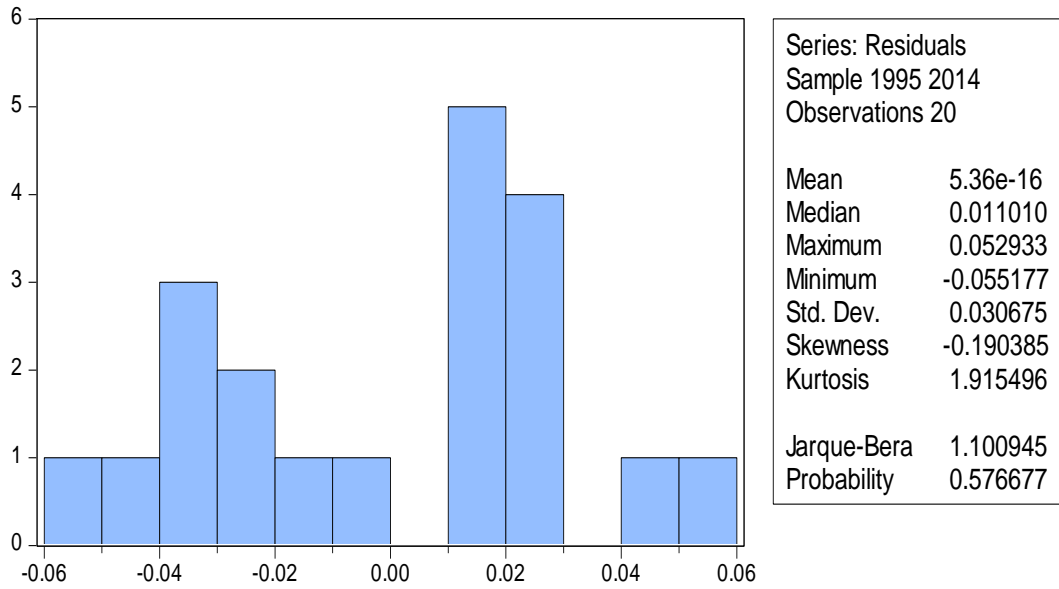
HASIL ESTIMASI REGRESI

Dependent Variable: IPM
Method: Least Squares
Date: 03/08/17 Time: 08:55
Sample: 1995 2014
Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.362285	0.573450	5.863260	0.0000
PertumbuhanEkonomi	0.056232	0.035265	1.594531	0.1304
Kemiskinan	-0.006374	0.006048	-1.053935	0.3076
PengeluaranPemerintah	0.000769	0.000216	3.565648	0.0026
R-squared	0.539971	Mean dependent var		4.274814
Adjusted R-squared	0.453716	S.D. dependent var		0.045227
S.E. of regression	0.033428	Akaike info criterion		-3.782017
Sum squared resid	0.017878	Schwarz criterion		-3.582871
Log likelihood	41.82017	Hannan-Quinn criter.		-3.743142
F-statistic	6.260144	Durbin-Watson stat		1.964019
Prob(F-statistic)	0.005144			

Lampiran 3

HasilUjiNormalitas



Lampiran 4

Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 03/18/17 Time: 11:49
Sample: 1995 2014
Included observations: 20

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.328845	5885.889	NA
Pertumbuhan Ekonomi	0.001244	5715.324	1.674127
Kemiskinan	3.66E-05	4.946273	1.735670
Pengeluaran Pemerintah	4.65E-08	1.990217	1.057497

Lampiran5

Hasil Uji Heterokedastisitas

HeteroskedasticityTest:Glejser

F-statistic	0.724432	Prob. F(3,16)	0.5521
Obs*R-squared	2.391747	Prob. Chi-Square(4)	0.4952
Scaled explained SS	1.025223	Prob. Chi-Square(4)	0.7951

Lampiran 6

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.645060	Prob. F(2,15)	0.5395
Obs*R-squared	1.687520	Prob. Chi-Square(2)	0.4301

Lampiran 7

Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Prob.	$\alpha = 5\%$	kesimpulan
C	3.362285	0.0000	0.05	-
PertumbuhanEkonomi	0.056232	0.1304	0.05	Tidak Sig.
Kemiskinan	-0.006374	0.3076	0.05	Tidak Sig.
PengeluaranPemerintah	0.000769	0.0026	0.05	Sig.

Lampiran 8

Tabel F
(Pada Taraf Signifikansi 0,05)

D f2	Df1														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16	19	21	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24
1	1	9	6	5	0	4	7	9	1	2	3	4	5	5	6
2	18.	19.	19.	19.	19.	19.	19	19	19	19	19	19	19	19	19
2	51	00	16	25	30	.3	.3	.3	.3	.4	.4	.4	.4	.4	.4
3	10.	9.5	9.2	9.1	9.0	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.
3	13	5	8	2	1	94	89	85	81	79	76	74	73	71	70
4	7.7	6.9	6.5	6.3	6.2	6.	6.	6.	6.	5.	5.	5.	5.	5.	5.
4	1	4	9	9	6	16	09	04	00	96	94	91	89	87	86
5	6.6	5.7	5.4	5.1	5.0	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
5	1	9	1	9	5	95	88	82	77	74	70	68	66	64	62
6	5.9	5.1	4.7	4.5	4.3	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	3.	3.	3.
6	9	4	6	3	9	28	21	15	10	06	03	00	98	96	94
7	5.5	4.7	4.3	4.1	3.9	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
7	9	4	5	2	7	87	79	73	68	64	60	57	55	53	51
8	5.3	4.4	4.0	3.8	3.6	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
8	2	6	7	4	9	58	50	44	39	35	31	28	26	24	22
9	5.1	4.2	3.8	3.6	3.4	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
9	2	6	6	3	8	37	29	23	18	14	10	07	05	03	01
10	4.9	4.1	3.7	3.4	3.3	3.	3.	3.	3.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
10	6	0	1	8	3	22	14	07	02	98	94	91	89	86	85
11	4.8	3.9	3.5	3.3	3.2	3.	3.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
11	4	8	9	6	0	09	01	95	90	85	82	79	76	74	72
11	4.7	3.8	3.4	3.2	3.1	3.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
12	5	9	9	6	1	00	91	85	80	75	72	69	66	64	62
13	4.6	3.8	3.4	3.1	3.0	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
13	7	1	1	8	3	92	83	77	71	67	63	60	58	55	53
14	4.6	3.7	3.3	3.1	2.9	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
14	0	4	4	1	6	85	76	70	65	60	57	53	51	48	46
15	4.5	3.6	3.2	3.0	2.9	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
15	4	8	9	6	0	79	71	64	59	54	51	48	45	42	40
16	4.4	3.6	3.2	3.0	2.8	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
16	9	3	4	1	5	74	66	59	54	49	46	42	40	37	35
17	4.4	3.5	3.2	2.9	2.8	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
17	5	9	0	6	1	70	61	55	49	45	41	38	35	33	31
18	4.4	3.5	3.1	2.9	2.7	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
18	1	5	6	3	7	66	58	51	46	41	37	34	31	29	27
19	4.3	3.5	3.1	2.9	2.7	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
19	8	2	3	0	4	63	54	48	42	38	34	31	28	26	23
D f2	Df1														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2	4.3	3.4	3.1	2.8	2.7	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
0	5	9	0	7	1	60	51	45	39	35	31	28	25	22	20
2	4.3	3.4	3.0	2.8	2.6	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
1	2	7	7	4	8	57	49	42	37	32	28	25	22	20	18
2	4.3	3.4	3.0	2.8	2.6	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
2	0	4	5	2	6	55	46	40	34	30	26	23	20	17	15
2	4.2	3.4	3.0	2.8	2.6	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
3	8	2	3	0	4	53	44	37	32	27	24	20	18	15	13
2	4.2	3.4	3.0	2.7	2.6	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
4	6	0	1	8	2	51	42	36	30	25	22	18	15	13	11
2	4.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
5	4	9	9	6	0	49	40	34	28	24	20	16	14	11	09
2	4.2	3.3	2.9	2.7	2.5	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
6	3	7	8	4	9	47	39	32	27	22	18	15	12	09	07
2	4.2	3.3	2.9	2.7	2.5	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
7	1	5	6	3	7	46	37	31	25	20	17	13	10	08	06
2	4.2	3.3	2.9	2.7	2.5	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
8	0	4	5	1	6	45	36	29	24	19	15	12	09	06	04
2	4.1	3.3	2.9	2.7	2.5	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
9	8	3	3	0	5	43	35	28	22	18	14	10	08	05	03
3	4.1	3.3	2.9	2.6	2.5	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
0	7	2	2	9	3	42	33	27	21	16	13	09	06	04	01
3	4.1	3.3	2.9	2.6	2.5	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.
1	6	0	1	8	2	41	32	25	20	15	11	08	05	03	00
3	4.1	3.2	2.9	2.6	2.5	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	1.
2	5	9	0	7	1	40	31	24	19	14	10	07	04	01	99
3	4.1	3.2	2.8	2.6	2.5	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	1.
3	4	8	9	6	0	39	30	23	18	13	09	06	03	00	98
3	4.1	3.2	2.8	2.6	2.4	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	1.	1.
4	3	8	8	5	9	38	29	23	17	12	08	05	02	99	97
3	4.1	3.2	2.8	2.6	2.4	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	1.	1.
5	2	7	7	4	9	37	29	22	16	11	07	04	01	99	96